

BAB III
DINAMIKA PERKEMBANGAN PERSATUAN TARBIYAH
ISLAMİYAH (PERTI) DI BENGKULU 1934-2025

A. Sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Bengkulu

1. Sejarah Kelahiran Perti di Bengkulu

Kaum Tua pada dasarnya merupakan komunitas Muslim Minangkabau yang dalam bidang akidah berlandaskan paham Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, khususnya ajaran Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Muslim al-Maturidi, sedangkan dalam praktik ibadah mereka mengikuti mazhab Syafi'i. Meskipun tidak semua anggota secara aktif melaksanakan ajaran tarekat, mereka secara prinsip tetap mengakui legitimasi tarekat yang *mu'tabarah* dan merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi serta mempertahankan tradisi tersebut.¹

Tarekat, mazhab Syafi'i, maupun ajaran Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa penulis sejarah,² merupakan paham yang dominan dalam pengajaran Islam di Indonesia secara umum, dan di Minangkabau secara khusus, sejak masa masuknya Islam ke wilayah tersebut. Melalui berbagai kerajaan yang ada di Nusantara, ajaran dan sistem ini dijadikan landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama

¹ Alaidin Koto, *Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sejarah, Paham Keagamaan, Dan Pemikiran Politik 194-1970*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 27

² Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjad Mada University Press, 1985), hlm.235

terkait dengan aspek ibadah, munakahat, dan hukum kewarisan. Sistem tersebut kemudian dipersepsikan oleh Kaum Tua sebagai berada dalam kondisi terancam akibat gerakan pembaruan yang dibawa oleh Kaum Muda. Oleh karena itu, Kaum Tua merasa memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan melindungi paham yang telah dianggap mapan dan diterima luas di kalangan masyarakat.

Selain itu, terdapat beberapa alasan yang mendorong Kaum Tua untuk merasa memiliki tanggung jawab dalam mempertahankan paham tersebut, antara lain:

- a. Islam yang berkembang di Indonesia berlandaskan mazhab Syafi'i dengan iktikad Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, yang telah berakar kuat di tengah umat dan masyarakat Indonesia.
- b. Mazhab Syafi'i diakui secara sah dan diterima kebenarannya dalam ranah keilmuan Islam secara global.
- c. Beralih dari mazhab Syafi'i yang telah mapan kepada mazhab lain berpotensi menimbulkan perpecahan dan ketidakteraturan sosial, terutama di kalangan masyarakat awam.
- d. Konsistensi dalam mengikuti mazhab Syafi'i berkontribusi pada pemeliharaan dan penguatan kesatuan serta persatuan bangsa, sekaligus memperkokoh ukhuwah Islamiyah.

Selain alasan-alasan yang telah dikemukakan, sesungguhnya terdapat dasar yang lebih mendalam yang mendorong Kaum Tua untuk semakin intensif dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan mazhab Syafi'i dan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah di Minangkabau. Alasan itu, menurut Rusli A. Wahid, salah seorang yang ikut membidani lahirnya Perti, adalah untuk membendung arus modernisasi yang menganjurkan umat Islam untuk melakukan ijtihad secara mandiri dan langsung menetapkan hukum dari Al-Qur'an dan Hadis tanpa merujuk pada pendapat para ulama ahli. Menurut Rusli, gerakan semacam ini berpotensi membahayakan, karena saat ini tidak terdapat ulama yang memenuhi kriteria untuk berijtihad sebagaimana ditetapkan dalam disiplin Ilmu Ushul Fikih. Dengan kata lain, jika praktik ini dibiarkan, individu yang tidak kompeten dapat melakukan ijtihad secara bebas, sehingga berisiko menimbulkan kekacauan dan kerusakan dalam penerapan ajaran Islam.³

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, metode yang ditempuh oleh Kaum Tua dalam mempertahankan keyakinan mereka pada dasarnya memiliki kesamaan dengan strategi yang digunakan oleh Kaum Muda. Dengan kata lain, dalam menghadapi perbedaan pandangan, kedua kelompok menerapkan pendekatan yang serupa. Jika kaum muda menyuarakan gagasan mereka melalui penerbitan majalah, maka kaum tua pun mengambil langkah yang

³ Alaidin Koto, *Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sejarah, Paham Keagamaan, Dan Pemikiran Politik 194-1970*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 28

sama dengan menerbitkan majalah sebagai wadah untuk menyampaikan pemikiran dan mempertahankan prinsip mereka. Namun, tidak seluruh gagasan pembaruan yang diajukan oleh Kaum Muda ditolak oleh Kaum Tua; misalnya, inisiatif Kaum Muda untuk mengubah sistem pendidikan surau menjadi madrasah justru diterima dan diadopsi oleh Kaum Tua.

Dalam konteks pendidikan, Kaum Tua memulai upaya pembaruan melalui suatu gerakan yang berawal di Candung. Pada tahun 1926, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mengambil inisiatif untuk mereformasi sistem pendidikan di Surau Baru Candung yang didirikan pada tahun 1327 H (1908 M). Metode pengajaran *halaqah* di surau tersebut diubah menjadi sistem kelas layaknya madrasah. Selain itu, ia juga memperlengkapi madrasah dengan fasilitas pendidikan modern, seperti meja, kursi, papan tulis, dan lain-lain. Dalam waktu relatif singkat, inovasi yang diperkenalkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini diikuti oleh rekan-rekan sesama Kaum Tua yang memiliki surau sebagai tempat pendidikan, antara lain Syekh A. Wahid di Tabek Gadang, Payakumbuh Syekh Muhammad Jamil Jaho di Padang Panjang dan Syekh Arifin di Batu Hampar. Akibatnya, wilayah Ranah Minang menjadi berkembang pesat dengan berdirinya berbagai madrasah baru.⁴

Sebelum berdirinya Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), telah berkembang terlebih dahulu sejumlah madrasah yang

⁴ Alaidin Koto, *Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sejarah, Paham Keagamaan, Dan Pemikiran Politik 194-1970*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 30.

dikenal dengan Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Dari madrasah-madrasah inilah kemudian lahir gagasan untuk mendirikan sebuah organisasi. Hal ini menunjukkan perbedaan mendasar antara PERTI dan organisasi Islam lainnya. Jika organisasi lain pada umumnya mendirikan madrasah sebagai sarana pendidikan, maka PERTI justru didirikan oleh para ulama dan tokoh madrasah itu sendiri. Secara resmi, PERTI berdiri pada bulan Mei 1928, dan sejak saat itu menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Hampir di setiap kecamatan di Minangkabau berdiri madrasah Tarbiyah Islamiyah, dengan peserta didik yang tidak hanya berasal dari Minangkabau, tetapi juga dari berbagai daerah di Nusantara, bahkan dari Malaysia, Sulawesi, dan Bengkulu.

Salah satu kebijakan penting yang diterapkan PERTI pada masa awal adalah mendorong para murid yang telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas tujuh untuk kembali ke daerah asal mereka dan mendirikan madrasah serupa. Kebijakan ini menjadikan penyebaran madrasah Tarbiyah Islamiyah berlangsung secara cepat, baik di Minangkabau maupun di luar wilayah tersebut, termasuk ke provinsi Bengkulu. Secara historis, Bengkulu khususnya daerah Mukomuko hingga Pekal dapat dikategorikan sebagai bagian dari wilayah budaya Minangkabau, sehingga tidak mengherankan jika perkembangan pendidikan Tarbiyah Islamiyah di dua wilayah tersebut berjalan cukup pesat.

Pada tahun 1933, salah seorang murid Madrasah Tarbiyah Islamiyah Jaho bernama Abdul Majid yang berasal dari Bukittinggi

merantau ke Bengkulu, tepatnya ke Muara Aman. Di tempat tersebut, ia kemudian mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang menjadi salah satu tonggak awal perkembangan PERTI di Bengkulu.⁵

Pada tahun 1934, KH. Abdul Muthalib mendirikan Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah di Kerkap. Setelah menuntaskan pendidikan agamanya hingga tingkat kelas tujuh di MTI Candung, beliau menerima amanah dari kedua gurunya, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dan KH. Sirajuddin, untuk mengembangkan eksistensi Persatuan Tarbiyah Islamiyah di wilayah Bengkulu. Wasiat dari kedua gurunya inilah yang mendorong Abdul Muthlib bertekad mengibarkan bendera Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Bengkulu, dengan mengupayakan berdirinya lembaga pendidikan Tarbiyah Islamiyah di daerah ini. Karena alasan ini, beliau memutuskan untuk pulang ke tanah kelahirannya, Desa Kerkap pada tahun 1926. Sejak saat inilah Abdul Muthalib mulai melakoni perannya sebagai tokoh perintis pelopor bagi hadirnya madrasah yang secara kelembagaan maupun model pendidikannya, merupakan prototype Madrasah Tarbiyah Islamiyah pertama di Bengkulu.⁶

⁵ Wawancara dengan Bapak Murkilim tanggal 16 juli 2025, pukul 13:00.

⁶ Hery Noer Aly, dkk, *Geneologi Jaringan Uama di Kota Bengkulu*, Laporan Penelitian, hlm 37

B. Perkembangan PERTI di Bengkulu Sebelum kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

1. Masa Sebelum Kemerdekaan Tahun 1934-1945

Pembicaraan mengenai PERTI tidak bisa dilepaskan dari sejarah awalnya. PERTI didirikan oleh beberapa orang ulama Minangkabau, antara lain Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Muhammad Jamil Jaho, Syekh Saad Mungka, dan beberapa ulama lainnya. Sebelum PERTI berdiri secara formal, telah berkembang madrasah-madrasah Tarbiyah Islamiyah di Minangkabau.

Berbeda dengan organisasi Islam lainnya, PERTI didirikan oleh orang-orang madrasah, bukan organisasi yang mendirikan madrasah. Pada perkembangannya, madrasah Tarbiyah Islamiyah memiliki murid Sulawesi, dan Bengkulu. pada tahun 1933, seorang murid MTI Jaho bernama Abdul Majid asal Bukittinggi yang merantau ke Muara Aman bernama Abdul Majid mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Muara Aman. Inilah titik awal perkembangan PERTI di Bengkulu.⁷

Pada tahun 1934, KH. Abdul Muthalib mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah tingkat Tsanawiyah di Kerkap, yang selanjutnya dinamai "Tasyinaatul Khair". Dalam periode 1934-1937, beliau menjabat secara bersamaan sebagai pengajar dan kepala madrasah. Selain mendirikan Madrasah di Kerkap, KH. Abdul Muthalib turut merintis pendirian Madrasah Tarbiyah Islamiyah

⁷ Wawancara dengan Bapak Murkilim tanggal 16 Juli 2025, pukul 13:00.

di Aur Gading dan mengemban tugas sebagai kepala madrasah pada periode 1937-1943.⁸

Pada tahun 1934, Abuya Ki Zaidin Burhany, murid Inyiak Canduang-kembali ke Curup. Pada tahun 1938, ia bersama tokoh masyarakat setempat yang dipimpin Abuya Mohammad Saleh mendirikan MTI Curup dan Cabang PERTI Curup. Melalui basis Masjid Jamik Curup, Buya Zaidin mengonsolidasikan dukungan sosial sehingga PERTI menjadi kekuatan penting dalam dinamika keagamaan dan sosial-politik di wilayah Rejang Lebong.

Pada saat yang sama, Buya Zaidin didampingi oleh adiknya, Abuya KH. Ramli Burhany, yang berperan dalam pengajaran di MTI Curup, MTI Air Rambai, dan pengembangan kursus kaderisasi seperti KKDI Masjid Jamik Curup. Keterlibatan keluarga besar Buya Ramli kemudian berkembang menjadi kekuatan kaderisasi PERTI di tingkat lokal maupun provinsi.⁹

2. Masa Orde Lama Tahun 1945-1966

Pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia yang telah memiliki pemerintahan sendiri dan terbebas dari pengaruh kolonial berupaya melakukan reformasi di berbagai sektor kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan mutu dan kuantitas pendidikan, termasuk pendidikan Islam, mulai dirumuskan pada tingkat pusat.

⁸ Hery Noer Aly, dkk, *Geneologi Jaringan Uama di Kota Bengkulu*, Laporan Penelitian, hlm 38

⁹ Proposal Musyawarah Daerah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) tahun 2023.

Namun demikian, situasi perang kemerdekaan (revolusi fisik) menimbulkan beragam kendala yang menyebabkan pelaksanaan program pendidikan tidak berjalan secara optimal.

Dalam konteks Bengkulu, dinamika pendidikan, khususnya pendidikan Islam, pada masa perang kemerdekaan masih kurang terdokumentasikan. Sejumlah madrasah dan sekolah Islam yang telah berdiri sejak era pergerakan banyak mengalami masa vakum pada periode ini. Bagi lembaga yang tetap beroperasi, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak berjalan secara normal. Contohnya dapat dilihat pada Madrasah Muhammadiyah Kebun Ross, di mana proses pembelajaran mengalami gangguan signifikan akibat kondisi perang kemerdekaan.¹⁰

Pasca revolusi fisik, kondisi pendidikan mulai menunjukkan pemulihan menuju normalisasi. Beberapa madrasah yang sempat vakum selama masa revolusi secara bertahap kembali mengaktifkan kegiatan belajar-mengajar. Selain itu, pada dekade 1950-an, di Bengkulu muncul sejumlah madrasah baru yang didirikan baik oleh organisasi keagamaan maupun oleh individu. Pada tahun 1955, beberapa madrasah yang tercatat masih beroperasi di Kota Bengkulu antara lain: Mu'alimin Muhammadiyah Kebun Ross di bawah pimpinan Djalal Sajuthi, S.M.P.I PERTI di Malabro dengan pimpinan M. Idris, Ibtidaiyah

¹⁰ Amnur, Amnah Qurniari. *“Sejarah Perkembangan pendidikan Islam di Bengkulu Abad XX.”* Disertasi. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kaijaga Yogyakarta, 2017.hal 235.

Muhammadiyah Kebun Ross di bawah Mazni Hasan, serta Tarbiyah Islamiyah PERTI Bengkulu yang dipimpin oleh Zainul.¹¹

Pada tahun 1959, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) mengalami metamorfosis dari organisasi sosial-keagamaan menjadi partai politik, dengan KH. Abdul Muthalib sebagai ketuanya¹². Perubahan orientasi organisasi tersebut juga berdampak pada semakin luasnya keterlibatan tokoh-tokoh PERTI dari berbagai daerah dalam kegiatan organisasi di tingkat nasional.

Keterlibatan tokoh-tokoh PERTI asal Bengkulu dalam dinamika organisasi di tingkat nasional juga dapat dilihat pada pelaksanaan Kongres ke-X Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PI PERTI) yang diselenggarakan pada 13–20 Februari 1965 di Jakarta. Kongres ini melibatkan sejumlah tokoh asal Bengkulu, yang pada masa itu secara administratif masih berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Syekh Ahmad Lais (Bengkulen), Kiai Zaidin Burhani (Curup, Bengkulen), dan Kiai Abdul Muthalib (Kerkap, Bengkulen), yang tercatat sebagai penasehat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PI PERTI¹³.

¹¹ Syaputra, Een. *Dari Madrasah dan Pesantren Hingga Sekolah Islam Terpadu: Dinamika Lembaga Pendidikan Islam di Beng-kulu Pasca Kemerdekaan hingga Reformasi*. Jakarta: Direktorat Sejarah, 2019.hal 39.

¹² Wawancara dengan Bapak Murkilim tanggal 16 Juli 2025, pukul 13:00.

¹³ Machudum, Sjarkawi. *Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah: Ahlussunnah wal Jama'ah Pendiri Republik Indonesia*. Jakarta Pusat: Perpustakaan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 2011.hlm.60.

Perkembangan kehidupan sosial dan keagamaan di Bengkulu pada masa pasca proklamasi kemerdekaan berlangsung dalam situasi yang cukup dinamis. Kondisi perang kemerdekaan pada masa revolusi fisik memberikan pengaruh terhadap berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan dan organisasi keagamaan. Situasi tersebut menyebabkan sejumlah lembaga pendidikan Islam yang telah berdiri sebelumnya mengalami hambatan bahkan masa vakum, sementara lembaga yang tetap beroperasi tidak dapat menjalankan kegiatan secara normal akibat kondisi keamanan yang belum stabil.

Memasuki masa setelah revolusi fisik, kondisi sosial masyarakat secara bertahap mulai menunjukkan proses pemulihan. Hal ini ditandai dengan kembali aktifnya beberapa madrasah yang sebelumnya sempat terhenti serta munculnya sejumlah lembaga pendidikan Islam baru pada dekade 1950-an. Selain itu, organisasi-organisasi keagamaan juga mulai kembali menjalankan aktivitasnya dalam bidang pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Keberadaan lembaga pendidikan dan aktivitas organisasi tersebut menunjukkan adanya upaya dari berbagai pihak untuk mengembangkan kehidupan keagamaan masyarakat di Bengkulu.

Dalam perkembangan selanjutnya, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) menjadi salah satu organisasi yang turut berperan dalam dinamika kehidupan sosial, keagamaan, dan organisasi di Bengkulu. Perubahan status PERTI pada tahun 1959

dari organisasi sosial-keagamaan menjadi partai politik mencerminkan adanya perluasan peran organisasi tersebut dalam merespons perkembangan situasi nasional. Keterlibatan tokoh-tokoh PERTI asal Bengkulu dalam Kongres ke-X PI PERTI tahun 1965 di Jakarta juga menunjukkan bahwa kontribusi tokoh-tokoh daerah tidak hanya terbatas pada tingkat lokal, tetapi turut berpartisipasi dalam dinamika organisasi PERTI di tingkat nasional.

3. Masa Orde Baru Tahun 1966-1998

Sejak awal 1970-an, PERTI mengalami perpecahan internal di tingkat pusat dengan munculnya dua kubu, yakni kelompok yang tetap menggunakan nama PERTI dan kelompok yang menggunakan nama Tarbiyah Islamiyah. Perpecahan ini tidak hanya berdampak pada struktur organisasi di tingkat pusat, tetapi juga merembet ke daerah, termasuk Bengkulu. Akibatnya, perhatian organisasi lebih banyak terserap pada dinamika politik internal, sehingga sektor pendidikan yang sebelumnya menjadi basis utama gerakan PERTI mengalami kemunduran.

Dalam upaya merespons situasi tersebut sekaligus melegalkan kembalinya organisasi pada khittah awalnya sebagai organisasi sosial-keagamaan, dikeluarkan Pernyataan 1 Maret 1969 menghasilkan beberapa keputusan penting an-tara lain:

- a) Menyambut dan mentaati amanat Pendiri Utama Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang tertuang dalam Pernyataan 1 Maret 1969 sebagai Hukum Konvensi dalam organisasi.

- b) Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang telah kembali kepada dasar atau Khittahnya, sebagai organisasi sosial pendidikan, tidak terikat dan berafiliasi kepada salah satu partai politik apapun.
- c) Dalam pemilu 1971 Persatuan Tarbiyah Islamiyah menyalurkan aspirasi politiknya kepada Sekber Golkar guna menyukseskan Pembangunan dan Pemilu untuk kemenangan Orde Baru.
- d) Kedudukan Pengurus Besar ditetapkan di Bukittinggi Sumatera Barat

yang kemudian dikukuhkan melalui Musyawarah Besar (Mubes) ke-I Persatuan Tarbiyah Islamiyah pada tanggal 2-4 Juli 1970 di Bukittinggi, Sumatera Barat. Sejak musyawarah ini, istilah “kongres” yang sebelumnya digunakan dari Kongres I hingga Kongres X tidak lagi dipakai. Musyawarah Besar (Mubes) pertama dihadiri oleh delegasi dari berbagai provinsi tingkat I, antara lain Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa, serta Sumatera Barat sebagai daerah penyelenggara. Dari Bengkulu, hadir beberapa tokoh, yaitu Kiai Abdul Muthalib, Kiai Abdul Majid, Kiai Awaluddin, dan Kiai Zaidin Burhani.¹⁴

Perubahan kebijakan politik pada masa rezim Orde Baru pada akhirnya juga membawa pengaruh kepada PERTI. Tahun

¹⁴ Machudum, Sjarkawi. *Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah: Ahlussunnah wal Jama'ah Pendiri Republik Indonesia*. Jakarta Pusat: Perpustakaan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 2011.hlm.81-83.

1965–1966, rezim Orde Baru mengambil kebijakan untuk menata ulang parta-partai politik di Indonesia, dengan menciutkan partai-partai politik menjadi tiga kekuatan politis saja, yakni Golkar, PDI, dan PPP. Sejak masa ini, Partai Islam PERTI kembali pada khittah awalnya sebagai organisasi Islam (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) yang berkiprah pada pendidikan Islam dan dakwah keagamaan. Namun secara politik, Tarbiyah memutuskan berafiliasi pada Partai Golkar. Keputusan ini berdampak pada munculnya penentangan dari kader-kader partai yang tidak menyetujui pilihan politik partai ini. Hal inilah yang menyebabkan sebagian dari pengurus PI PERTI memilih untuk pindah ke Partai Persatuan Islam (PPP), antara lain: Adnan Ilyas, Amran Rani, dan Zainul. Namun beberapa pemuka Tarbiyah, seperti K. Burhani, K. Awaludin, Muhammad Taher Dayok, Abdul Majid, Abdul Gafur, Mahruf, dan Kawil, tetap setia pada kepemimpinan beliau, dan memilih untuk kembali membentuk kepengurusan Tarbiyah yang baru.¹⁵

Dalam situasi organisasi yang diwarnai oleh dinamika dan ketegangan politik tersebut, upaya mempertahankan identitas dan peran Tarbiyah di bidang pendidikan tetap berlangsung di tingkat lokal. Meski demikian, sejumlah tokoh tetap berusaha melestarikan tradisi pendidikan, misalnya Buya Muhammad Rusli, alumni MTI Lampasi Payakumbuh, yang pada tahun 1972 menjadi

¹⁵ Hery Noer Aly, dkk, *Geneologi Jaringan Uama di Kota Bengkulu*, Laporan Penelitian, hlm 40

wakil direktur Pesantren Pancasila di Bengkulu. Hal yang sama dilakukan oleh Abuya Abdul Aziz di Talang Tige, yang merintis Pesantren Safi Mubaroq pada era 1980-an dan kini diteruskan oleh putranya, Safrullah.¹⁶

Keberlanjutan konsolidasi organisasi PERTI pada dekade berikutnya menunjukkan upaya menjaga kesinambungan struktur dan peran daerah dalam kepengurusan nasional. Musyawarah Besar (Mubes) ke-II Persatuan Tarbiyah Islamiyah diselenggarakan pada 23–26 Maret 1979 di Pusat Himpunan Islam (PHI), Ciliwung, Jakarta Timur, dan dibuka oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Saparjo. Mubes ini dihadiri oleh pengurus pusat, para penasehat, serta perwakilan pengurus daerah tingkat I se-Indonesia, termasuk Bengkulu. Dalam forum tersebut, tokoh asal Bengkulu, KH. Abdul Muthalib, tercatat sebagai anggota urusan daerah, sedangkan KH. Awaluddin tercatat sebagai anggota Majelis Pertimbangan Tertinggi Persatuan Tarbiyah Islamiyah periode 1979–1984.¹⁷

Selanjutnya, Musyawarah Nasional (Munas) III Persatuan Tarbiyah Islamiyah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 5–9 Mei 1984, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Tarbiyah Islamiyah ke-56, dan dihadiri oleh perwakilan 21 Dewan Pimpinan Daerah tingkat I se-Indonesia. Dalam susunan Majelis

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Murkilim tanggal 16 juli 2025, pukul 13:00.

¹⁷ Machudum, Sjarkawi. *Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah: Ahlussunnah wal Jama'ah Pendi Republik Indonesia*. Jakarta Pusat: Perpustakaan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 2011.hlm.91-92.

Pertimbangan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah masa bakti 1984–1989, tercantum nama KH. Abdul Muthalib dan KH. Awaluddin sebagai anggota yang berasal dari Bengkulu.¹⁸

Sementara itu, pada periode awal dekade 1980-an, sebelum pelaksanaan Munas III tersebut, dinamika PERTI di Bengkulu juga ditandai oleh upaya penguatan bidang pendidikan di tingkat lokal. Pada tahun 1982, PERTI mendirikan Madrasah di Kebun Geran dengan memanfaatkan dukungan dari Departemen Agama. Pada periode awal pendiriannya, lembaga ini mengalami berbagai kendala, termasuk kesulitan dalam penerimaan peserta didik serta keterbatasan tenaga pengajar. Akibatnya, kegiatan pendidikan dan pengajaran madrasah kemudian diintegrasikan dengan SMP GUPI Bengkulu yang berada di bawah kepemimpinan Drs. Yusuf Ya'qub. Meskipun menghadapi keterbatasan, KH. Abdul Muthalib tetap berinisiatif memberikan pendidikan agama kepada anak-anak pada sore hari. Walaupun perkembangan lembaga ini terbatas, madrasah tetap berfungsi sebagai sekolah sore hingga tahun 1985.¹⁹ Setelah mengamati kondisi Madrasah Tarbiyah yang menunjukkan kecenderungan stagnasi, Abdul Muthalib beserta beberapa tokoh Tarbiyah lainnya mengambil keputusan untuk

¹⁸ Machudum, Sjarkawi. *Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah: Ahlussunnah wal Jama'ah Pendiri Republik Indonesia*. Jakarta Pusat: Perpustakaan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 2011.hlm.94-95.

¹⁹ Hery Noer Aly, dkk, *Geneologi Jaringan Uama di Kota Bengkulu*, Laporan Penelitian, hlm 73.

mengalihkan fungsi madrasah tersebut menjadi sekolah umum, yang kemudian dinamai Sekolah Menengah Atas Pembangunan.

Sejak awal 1970-an, PERTI mengalami perpecahan internal menjadi dua kubu, yaitu kelompok yang tetap menggunakan nama PERTI dan kelompok Tarbiyah Islamiyah. Perpecahan ini berdampak hingga ke daerah, termasuk Bengkulu, dan menyebabkan perhatian organisasi lebih banyak terserap pada konflik politik internal, sehingga bidang pendidikan yang sebelumnya menjadi basis utama gerakan mengalami kemunduran.

Pada masa Orde Baru, kebijakan penyederhanaan partai politik semakin memperkuat perpecahan tersebut. PERTI kembali ke khittah sebagai organisasi sosial-keagamaan, namun Tarbiyah memilih berafiliasi dengan Partai Golkar. Keputusan ini memicu penolakan dari sebagian kader yang kemudian memilih bergabung dengan PPP, sementara tokoh-tokoh lain tetap setia pada kepemimpinan Tarbiyah. Kondisi ini melemahkan konsolidasi organisasi, khususnya dalam pengembangan pendidikan.

Meski demikian, upaya mempertahankan tradisi pendidikan tetap dilakukan di tingkat lokal. Di Bengkulu, tokoh seperti Buya Muhammad Rusli dan Abuya Abdul Aziz berperan dalam pengembangan pesantren dan pendidikan Islam. Selain itu, PERTI juga mendirikan Madrasah Tarbiyah di Kebun Geran pada tahun 1982, meskipun mengalami keterbatasan murid dan tenaga pengajar hingga akhirnya dialihkan menjadi sekolah umum pada tahun 1985.

Dengan demikian, pada masa Orde Baru, PERTI di Bengkulu mengalami kemunduran di bidang pendidikan akibat konflik politik internal dan tekanan kebijakan negara. Namun, peran tokoh-tokoh lokal menunjukkan bahwa semangat pendidikan Tarbiyah tetap bertahan meskipun dalam kondisi yang terbatas.

4. Masa Reformasi Tahun 1998-2025

Kepemimpinan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Bengkulu mengalami kesinambungan yang relatif stabil dari masa ke masa. Pada periode 1991–2001, organisasi ini dipimpin oleh Buya Muhammad Rusli, yang kemudian estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Buya Jali Afandi pada tahun 2001–2010. Selanjutnya, kepengurusan PERTI Bengkulu berada di bawah kepemimpinan Buya Zulman Zuhri selama periode 2011–2016. Pada periode berikutnya, amanah kepemimpinan dipercayakan kepada Buya Murkilin (2017–2023).

Setelah 46 tahun terpecah dua sejak tahun 1970, akhirnya dua organisasi keagamaan Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan Perti menyelenggarakan Munas dan Muktamar bersama. Acara tersebut sebagai penanda islahnya kedua organisasi tersebut pada 21-23 Oktober 2016 yang dibuka langsung oleh Presiden Jokowi di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Buya Basri Bermenda dan Buya Tengku M. Faisal Amin terpilih secara resmi sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Tarbiyah

PERTI, sebagai hasil rekonsiliasi antara Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan PERTI. Sebelumnya, Buya Basri Bermanda menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah, sedangkan Buya M. Faisal Amin menjabat sebagai Ketua Umum PERTI.²⁰

Di Bengkulu sendiri Dr. Murkilim kembali diberi amanah untuk memimpin Perti di Bengkulu dari tahun 2016-2023, pada tanggal 23 Desember 2023 digelar untuk memilih ketua baru, kegiatan ini dilaksanakan di Balai Pendopo Pat Petulai Curup, Kabupaten Rejang Lebong. dalam Musda ini telah muncul 4 kandidat yang siap bertarung dalam perebutan kursi ketua Perti Bengkulu. Mereka adalah Prof. Dr. Heri Nur Ali, M. Ag, dari PD Bengkulu, Buya Dr. Murkilim, M. Ag, ketua periode 2018-2023, Dr. Syukrianto dari PC Utara. Serta Dedi Mardiansyah dari PC Rejang Lebong. dengan hasil terpilihnya Dr. Syukrianto sebagai ketua tahun 2024-2029.²¹

Dalam perjalanan sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Bengkulu, kesinambungan kepemimpinan organisasi tidak hanya dapat dilihat dari struktur kepengurusan di tingkat daerah, tetapi juga dari keterlibatan tokoh-tokohnya dalam dinamika organisasi di tingkat nasional. Sejak PERTI bermetamorfosis dari organisasi sosial-keagamaan menjadi partai politik dengan nama Partai Islam PERTI pada tahun 1959, KH.

²⁰ "Tarbiyah Perti Menyelesaikan Munas dan Muktamar Islah". SINDONews. 24 Oktober 2016. Diakses tanggal 1 oktober 2025 jam 21:41

²¹ Wawancara dengan Bapak Sukrianto pada tanggal 6 November 2025, pukul 09:00.

Abdul Muthalib tampil sebagai figur sentral dan terpilih sebagai ketua umum.²² Peran tokoh-tokoh asal Bengkulu di tingkat pusat tercatat secara jelas pada tahun 1965, ketika beberapa tokoh Bengkulu terlibat dalam kepengurusan nasional Partai Islam PERTI. Tokoh-tokoh tersebut adalah Syekh Ahmad Lais (Bengkulen), Kiai Zaidin Burhani (Curup, Bengkulu), dan Kiai Abdul Muthalib (Kerap, Bengkulu), yang tercatat sebagai penasehat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PI PERTI. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa sejak pertengahan 1960-an, tokoh Bengkulu telah memiliki posisi strategis dalam struktur kepemimpinan nasional PERTI.

Memasuki akhir dekade 1960-an, tepatnya sejak tahun 1969–1970, PERTI secara organisatoris kembali menegaskan jati dirinya sebagai organisasi Islam yang berorientasi pada pendidikan dan dakwah. Pada fase ini, tokoh-tokoh asal Bengkulu tetap aktif dalam proses konsolidasi organisasi di tingkat nasional. Pada tahun 1970, tercatat beberapa tokoh Bengkulu seperti Kiai Abdul Muthalib, Kiai Abdul Majid, Kiai Awaluddin, dan Kiai Zaidin Burhani terlibat dalam forum-forum nasional PERTI yang membahas arah dan struktur organisasi pasca perubahan orientasi politik. Kehadiran mereka menandai kesinambungan peran Bengkulu dalam menjaga keberlangsungan organisasi di tingkat pusat.

²² Hery Noer Aly, dkk, *Geneologi Jaringan Uama di Kota Bengkulu*, Laporan Penelitian, hlm 39.

Peran tersebut berlanjut pada periode berikutnya. Pada tahun 1979-1984, KH. Abdul Muthalib tercatat menjalankan peran dalam urusan daerah di tingkat pusat, sementara KH. Awaluddin menjadi bagian dari Majelis Pertimbangan Tertinggi Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Selanjutnya, pada periode 1984-1989, kedua tokoh tersebut kembali tercantum dalam struktur pertimbangan pusat PERTI sebagai perwakilan dari Bengkulu.²³ Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi dinamika dan pergeseran orientasi organisasi, keterlibatan tokoh-tokoh Bengkulu dalam kepemimpinan nasional PERTI berlangsung secara berkesinambungan dari dekade 1960-an hingga akhir 1980-an.

Sementara itu, di tingkat daerah Bengkulu, kesinambungan kepemimpinan organisasi pasca periode KH. Abdul Muthalib hingga menjelang kepemimpinan Buya Muhammad Rusli belum dapat direkonstruksi secara rinci karena keterbatasan data yang terverifikasi, baik dari sumber tertulis maupun wawancara. Namun demikian, kepemimpinan PERTI Bengkulu pada periode berikutnya dapat ditelusuri dengan lebih jelas, dimulai dari Buya Muhammad Rusli (1991-2001), dilanjutkan oleh Buya Jali Afandi (2001-2010), Buya Zulman Zuhri (2011-2016), dan Buya Murkilim (2017-2023). Pada periode yang lebih mutakhir, kepemimpinan Sukrianto (2024-2029) melanjutkan proses pembinaan organisasi,

²³ Machudum, Sjarkawi. *Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah: Ahlussunnah wal Jama'ah Pendiri Republik Indonesia*. Jakarta Pusat: Perpustakaan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 2011.hlm.81-95.

pengembangan madrasah, serta konsolidasi PERTI di wilayah Bengkulu.²⁴



²⁴ Wawancara dengan Bapak Murkilim tanggal 18 Desember 2025, pukul 16:46.